LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKjIP)

TAHUN 2024

KECAMATAN NGANJUK

KABUPATEN NGANJUK

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan YME, atas terselesaikannya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Nganjuk Tahun 2024. Dokumen ini kami susun setelah pelaksanaan program/kegiatan APBD 2024 sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen LKjIP ini menyajikan hasil pengukuran kinerja Kecamatan Nganjuk Tahun 2024 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, sehingga diharapkan dapat memberikan informasi tentang keberhasilan/kegagalan Kecamatan Nganjuk dalam melaksanakan program/kegiatan untuk mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi organisasi perangkat daerah Kecamatan Nganjuk. Proses penyusunan dokumen ini, tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini tak lupa kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi saran, masukan serta informasi terhadap isi laporan ini.

Semoga laporan yang kami susun ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi bagi pihak-pihak yang berwenang serta sebagai bahan pengambilan kebijakan lebih lanjut.

Nganjuk, Januari 2025
CAMAT NGANJUK

HARI MOEKTIONO, S.STP.,M.AP.
Pembina Tingkat I
NIP. 19780503 199711 1 001

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Gambaran Umum /Latar Belakang

Maksud dan Tujuan

Landasan Hukum

Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi

Isu-Isu Strategis Yang Sedang Dihadapi Organisasi

Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Ikhtisar Ringkasan Renstra/Renja dan;

Perjanjian Kinerja Pada Tahun Yang Bersangkutan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

A.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

A.2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun tahun sebelumnya

A.3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target Akhir pada Dokumen Restra

A.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Berkenan (n) dengan Standard Nasional (Minimal dengan Regional/Provinsi/Kabupaten yang berbatasan)

A.5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

A.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

A.7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan /Kegagalan pencapaian Kinerja

B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN I

LAMPIRAN II

LAMPIRAN III

LAMPIRAN IV

BAB I
PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM / LATAR BELAKANG

Gambaran umum Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk memiliki luas wilayah 2258,67 Ha yang sebagian besar terdiri dari kawasan permukiman dan pekarangan seluas 882,71Ha, lahan kering seluas 1271.15 Ha dan lainnya seluas 104,81 Ha.

Secara Administratif Kecamatan Nganjuk terdiri dari 13 (tigabelas) Kelurahan dan 2 (dua) Desa yaitu :

Tabel 1.1

Kelurahan dan Desa			
	Kelurahan Jatirejo		Kelurahan Mangundikaran
	Kelurahan Begadung		Kelurahan Payaman
	Kelurahan Bogo		Kelurahan Ploso
	Kelurahan Cangkringan		Kelurahan Ringinanom
	Kelurahan Ganungkidul		Kelurahan Werungotok
	Kelurahan Kartoharjo		Desa Kedungdowo
	Kelurahan Kauman		Desa Balongpacul
	Kelurahan Kramat		

Sedangkan jumlah penduduk 71.134 jiwa dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.2

Penduduk Kecamatan Nganjuk

No.	Nama Desa/Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
	Kelurahan Jatirejo	2.994	3.118	6.113
	Kelurahan Begadung	3.753	2.751	6.504
	Kelurahan Bogo	1.533	1.574	3.107
	Kelurahan Cangkringan	1.282	1.253	2.535
	Kelurahan Ganungkidul	1.572	1.707	3.279
	Kelurahan Kartoharjo	2.394	2.397	4.791
	Kelurahan Kauman	2.923	3.069	5.992
	Kelurahan Kramat	3.586	3.628	7.214
	Kelurahan Mangundikaran	3.300	3.628	6.928
	Kelurahan Payaman	1.919	2.359	4.278
	Kelurahan Ploso	2.726	2.584	5.310
	Kelurahan Ringinanom	1.039	1.048	2.087
	Kelurahan Werungotok	3.340	3.400	6.740
	Desa Kedungdowo	2.118	2.146	4.264
	Desa Balongpacul	993	999	1.992
	Jumlah	35.473	35.661	71.134

Sedangkan luas wilayah 2258,67 Ha dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.3

Luas Wilayah Kecamatan Nganjuk

No	Nama Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (Ha)	Keterangan
	Kelurahan Jatirejo	198,09	
	Kelurahan Begadung	78,76	
	Kelurahan Bogo	93,22	
	Kelurahan Cangkringan	82,31	
	Kelurahan Ganungkidul	354,79	
	Kelurahan Kartoharjo	103,63	
	Kelurahan Kauman	182,41	
	Kelurahan Kramat	197,47	
	Kelurahan Mangundikaran	178,84	
	Kelurahan Payaman	69,32	
	Kelurahan Ploso	89,47	
	Kelurahan Ringinanom	329,74	
	Kelurahan Werungotok	199,89	
	Desa Kedungdowo	182,39	
	Desa Balongpacul	79,41	
	Jumlah	2.258,67	

Dalam rangka penyelenggaraan good governance, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan syah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Pemerintah Daerah maupun Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai kinerja satuan kerja perangkat daerah serta Pemerintah Daerahnya sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya. Dalam rangka upaya untuk memenuhi Instruksi Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk menyusun media

Pertanggungjawaban kinerja yang dituangkan dalam bentuk LkjIP Kecamatan Nganjuk Tahun 2024 yang diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja Kecamatan Nganjuk bagi Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder). Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk mengacu kepada Review Rencana Strategis Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019-2024. Rencana Kinerja Tahun 2024 Kecamatan Nganjuk merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2024, serta Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUAPBD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah Kabupaten Nganjuk.

Selanjutnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun berisikan informasi Laporan berdasarkan hasil pengukuran kinerja, Pencapaian Sasaran strategis yang berupa outcome (hasil) ataupun impact (dampak) dan sekaligus merupakan media pertanggungjawaban atas target kinerja yang telah diperjanjikan antara pimpinan dengan penerima mandat.

B. LANDASAN HUKUM

Sebagaimana dimanatkan Pasal 20 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa organisasi perangkat daerah diwajibkan untuk menyusun laporan kinerja tahunan. Adapun peraturan perundang-undangan yang mendukung dalam penyusunan laporan kinerja tahunan adalah sebagai berikut :

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;

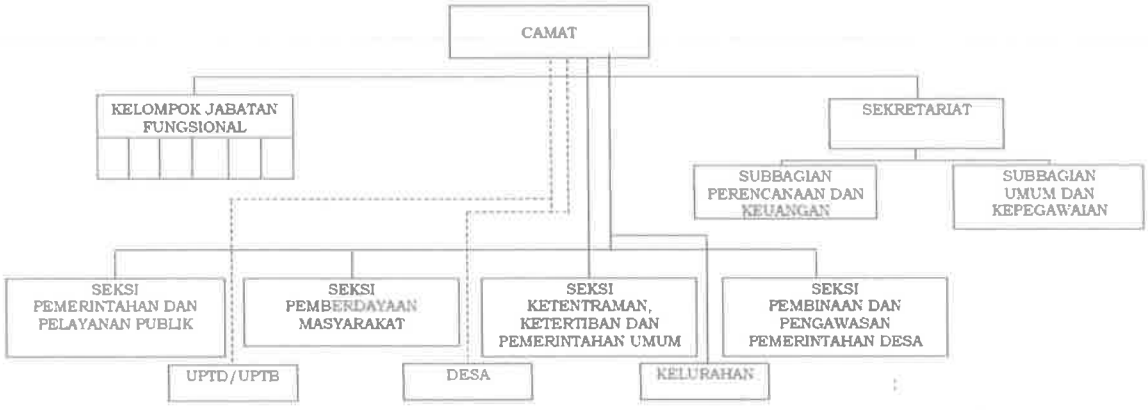
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas Dan Pejabat Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

Peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;

C. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, berikut dijelaskan struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi dari Kecamatan Nganjuk. Struktur Organisasi Kecamatan Nganjuk dan 13 Kelurahan yang ada di Kecamatan Nganjuk adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN NGANJUK KABUPATEN NGANJUK



STRUKTUR ORGANISASI
KELURAHAN DI
KECAMATAN NGANJUK KABUPATEN NGANJUK



Struktur Organisasi Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan
3. 2 (dua) Sub bagian yaitu Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
4. 4 (empat) Seksi yaitu Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa; Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik; Seksi Pemberdayaan Masyarakat; Seksi Ketentraman, Ketertiban,dan Pemerintahan Umum.

Struktur Organisasi yang ada pada 13 Kelurahan di Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk terdiri dari :

1. Lurah
2. Sekretaris Kelurahan
3. 3 (tiga) Seksi yaitu, Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, dan Seksi Ketentraman, Ketertiban, dan Pemerintahan Umum.

Untuk Tugas Pokok dan Fungsi dari Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

   Tugas pokok Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk yaitu: menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk mempunyai fungsi :

a. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
b. Pengoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
c. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
d. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat;
e. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan desa/kelurahan;
f. Pengkoordinasian upayapenyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
g. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan perda dan perkada;
h. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah; dan
i. Pelaksanaan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.
j. Kelurahan.

Untuk Kecamatan Nganjuk mempunyai 13 Kelurahan yang sangat memerlukan koordinasi untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kelurahan masing-masing.

Kelurahan mempunyai tugas pokok yaitu :

melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Camat sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan daerah, serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelurahan mempunyai fungsi yaitu :

1. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
2. Pemberdayaan masyarakat;
3. Pelayanan masyarakat;
4. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tabel 1.4

DAFTAR RINCIAN /KOMPOSISI PEGAWAI KECAMATAN NGANJUK

TAHUN 2024

No	Urusan/ Eselon	Jumlah Pegawai																Jumlah
		GOL IV				GOL III				GOL II				GOL I				
		A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Eselon III a	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2	Eselon III b	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
3	Eselon IV a	-	-	-	-	-	6	4	7	-	-	-	-	-	-	-	-	17
4	Eselon IV b	-	-	-	-		18	10	13	-	-	-	-	-	-	-	-	41
5	Pelaksana	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	5	13	-	-	2	2	25
Jumlah		1	1	-	-	1	25	14	20	-	1	5	13	-	-	2	2	85

Berdasarkan tabel diatas untuk ketersediaan pegawai yang ada di Kecamatan Nganjuk jumlah seluruhnya 85 orang terdiri dari 1 orang Camat, 1 orang Sekretaris Camat, 6 orang Pejabat Struktural di Kecamatan, 13 orang Kepala Kelurahan, 39 orang Pejabat Struktural di 13 Kelurahan, 25 orang Pelaksana dan dibantu 102 orang THL yang ada di Kecamatan sejumlah 8 orang dan 94 orang di 13 Kelurahan.

D. ISU-ISU STRATEGIS

Aspek-aspek strategis Kecamatan Nganjuk diperoleh dengan mengakomodasi isu-isu strategis yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan pada RPJMD Kabupaten Nganjuk 2024-2026.

Dengan demikian, pada bagian ini akan dijelaskan mengenai isu-isu strategis pada Kecamatan Nganjuk, yaitu :

1) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Nganjuk kepada Camat dibidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi

guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Nganjuk;

2) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan. terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh–sungguh memperhatikan Company/Coorperate Sosial Resposipility (CSR), maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3) Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan ativitas masyarakat;
4) Peningkatan Sinergitas Kecamatan. Peningkatan sinergitas kecamatan mendorong kesinambungan organisasi dan keterpaduan kinerja antar penyelenggara antar pemerintahan di wilayah Kecamatan Nganjuk guna mempercepat pelaksanaan pembangunan. Serta mengembangkan berbagai kreatifitas dan inovasi dalam penyelenggaraan program pembangunan guna peningkatan kesejateraan masyarakat.

Dari Isu strategis tersebut dikaitkan dengan pelaksanaan tugas pada Kecamatan Nganjuk terdapat beberapa pemasalahan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Belum semua urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dikoordinasikan secara optimal sesuai tugas dan fungsi;
2. Keterbatasan kemampuan sumber daya aparatur dalam merumuskan kebijakan dan menyikapi perubahan peraturan;
3. Mekanisme dan tata kerja pelaksanaan tugas yang belum Optimal.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum /Latar Belakang;
B. Maksud dan Tujuan
C. Landasan Hukum
D. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi
E. Isu-Isu Strategis Yang Sedang Dihadapi Organisasi
F. Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Ikhtisar Ringkasan Renstra/Renja dan;
B. Perjanjian Kinerja Pada Tahun Yang Bersangkutan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi
A.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023
A.2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun tahun sebelumnya
A.3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target Akhir pada Dokumen Restra
A.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Berkenan (n) dengan Standard Nasional (Minimal dengan Regional/Provinsi/Kabupaten yang berbatasan)
A.5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja
A.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
A.7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan /Kegagalan pencapaian Kinerja
B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. Ikhitisar / Ringkasan Renstra / Renja

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawabserta berorientasi kepada hasil (result oriented governement), perlu adanya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut, perlu adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan bahan utama untuk monitoring dan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dengan telah selesainya pelaksanaan tahun anggaran 2024, sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, semua instansi pemerintah, termasuk Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, wajib menyusun LKjIP. Informasi dalam dokumen LKjIP merupakan bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas setiap organisasi perangkat daerah.

Berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, dalam rangka pelaksanaan tugas Pemerintahan Kabupaten Nganjuk, mewujudkan dan mendukung sasaran pembangunan daerah **"Meningkatkan reformasi birokrasi yang akuntabel"**, maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang diharapkan dapat dicapai sesuai Rencana Strategis Kecamatan Nganjuk, tujuannya **"Meningkatnya Sinergitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan",** dengan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
2. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan

Untuk mencapai sasaran tersebut telah ditetapkan indikator dengan capaian seperti dalam tabel berikut :

Sasaran 1. Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan Kecamatan	86,09	89,27	104%

Sasaran 2. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	30	20	67,66%

Rencana Strategis Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 mempunyai tujuan dan sasaran strategis sebagai berikut :

a. Tujuan : Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan
   Indikator : Indeks Sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
b. Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
   Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
c. Sasaran 2 : Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan
   Indikator : Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan

Masing-masing Sasaran strategis tersebut memiliki 1 indikator kinerja dengan target kinerja untuk Tahun 2024 adalah sebagaimana tabel di bawah :

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2024 Kecamatan Nganjuk

No.	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan		Indeks Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	85,58

		Meningkatkan kualitas Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,09
		Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	30%

Indikator kinerja dalam dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Nganjuk merupakan Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator), yaitu ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator dalam dokumen IKU berlaku 3 tahunan menyesuaikan dokumen renstra SKPD dan RPJMD dan digunakan sebagai acuan organisasi perangkat daerah.

Sasaran strategis dengan indikator capaiannya dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program dan kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakterisrik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi.

Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program. Rencana Kinerja Tahun 2024 Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk 2024-2026 dengan mengambil target tahun 2024.

2.2 Perjanjian Kinerja

Sesuai ketentuan Perjanjian Kinerja Kecamatan Nganjuk 2024 disusun sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja berdasar Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk 2024-2026 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024. Perjanjian Kinerja terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
2. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan

Berikut Perjanjian Kinerja Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Tahun 2024

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja Kecamatan Nganjuk Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan kualitas Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,09
2.	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	30

No.	Program	Anggaran	Ket
1	2	3	4
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.404.517.720	APBD
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	72.191.450	APBD
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	4.468.740.162	APBD
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	17.609.850	APBD
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	16.462.500	APBD
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	2.615.123.550	APBD
		25.594.465.232	

Untuk mencapai/ mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk melaksanakan 6 (enam) Program, 16 (enambelas) Kegiatan dan 31 (tigapuluh satu) Sub Kegiatan dengan Pagu Awal Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp.25.594.465.232,- yang selengkapnya sebagaimana dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Tahun 2024. Namun setelah adanya perubahan pagu anggaran menjadi sebesar Rp.24.568.188.699,-.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Nganjuk merupakan perwujudan kewajiban Kecamatan Nganjuk untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Nganjuk Tahun 2024 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian indikator kinerja sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkatkeberhasilannya. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (performance plant) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, untuk digunakan dalam pengambilan keputusan.

Dalam rangka menetapkan indikator kinerja yang baik, dipergunakan kriteria SMART sebagai akronim dari specific (spesifik), measurable (terukur), achievable (dapat dicapai), relevant (relevan), dan timebound (memiliki batas waktu).

Untuk mengukur capaian indikator kinerja Kecamatan Nganjuk Tahun 2024, rumus yang dipergunakan adalah :

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\ \%$$

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Kecamatan Nganjuk menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi empat katagori, dengan

pengukuran kinerja difokuskan pada aspek capaian kinerja sasaran strategis dan kegiatan sebagai berikut :

Kategorisasi Predikat Capaian Kinerja

No.	Interval Nilai	Predikat
1.	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2.	75 % sampai 100%	Baik
3.	55 % sampai 75%	Cukup
4.	Kurang dari 55 %	Kurang

Capaian kinerja Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu, dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah.

Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja.

Sedangkan pengukuran kinerja sasaran sebagaimana yang telah ditentukan dalam Dokumen Penetapan Kinerja dapat dilihat secara rinci sebagai berikut :

A.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tabel 3.1.1
Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Capaian (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Tujuan Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan	Indeks sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	85,58	86,70	101
2.	Sasaran 1 Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,09	89,27	104

3.	Sasaran 2 Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	30%	33,33%	111%

Analisa atas capaian indikator-indikator tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

- **Tujuan Kecamatan Nganjuk Meningkatnya Sinergitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan dengan indikatornya Indeks Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan**

  Dari penilaian sinergitas kecamatan terealisasi 86,70 dari target sebesar 85,58. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sudah mencapai target dengan hasil capaiannya sebesar 101%.

  Dalam penilaian sinergitas tersebut terdapat 7 aspek, diantaranya sebagai berikut :

  1. Aspek Penyelanggaraan Urusan Pemerintahan Umum
  2. Aspek Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan
  3. Aspek Penyelenggaraan Tugas Atributif
  4. Aspek Pelaksanan Tugas Delegatif
  5. Aspek inovasi/ kreativitas kecamatan pada segala aspek penilaian
  6. Aspek Pengelolaan Anggaran Kecamatan
  7. Pelaksanaan Tugas Lainnya

  Dalam dalam hasil penilaian sinergitas kinerja kecamatan (SKK) tahun 2024 dari 7 aspek tersebut sudah terpenuhi, kecamatan Nganjuk memiliki inovasi/kreativitas yaitu RT Cantik sehingga mendongkrak hasil nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan Nganjuk.

- ***Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan***

  Indeks kepuasan masyarakat tahun 2024 yang diambil datanya dari Aplikasi e-Sukma terealisasi "Sangat Baik" dari realisasi sebesar 89,27 dibagi target yang ditetapkan sebesar 86,09 sehingga diperoleh prosentase capaian sebesar 104%.

  Faktor yang mempengaruhi Capaian IKM di Kecamatan Nganjuk yang hasil capaiannya melebihi target ada 9 (sembilan) unsur yaitu :

  1. Persyaratan (U1)

     Persyaratan didalam pengurusan surat menyurat ataupun rekomendasi yang dilimpahkan kepada Camat bersifat paten sesuai dengan regulasi yang berlaku terealisasi 86,18 %.

  2. Sistem, Mekanisme dan prosedur (U2)

     Sistim, mekanisme dan prosedur pelayanan di Kecamatan Nganjuk sudah sesui

dengan SOP yang telah disusun dan disosialisasikan kepada masyarakat terealisasi 86,57%.

3. Waktu Penyelesaian (U3)

   Waktu penyelesaian terkadang tidak sesuai dengan yang direncanakan karena terkendala beberapa factor contohnya Aplikasi yang terkadang error sehingga mengalami keterlambatan penyelesaian, untuk waktu penyelesaiaan terealisasi 85,73%.

4. Biaya / Tarif (U4)

   Biaya dalam pengurusan surat–surat dan Pelayanan di Keacamatan Nganjuk tidak dikenakan biaya / gratis terealisasi 99,58%.

5. Produk sepesifikasi jenis pelayanan (U5)

   Jenis Pelayanan di Kecamatan Nganjuk antara lain :

   a. Perekaman KTP
   b. Pelayanan Pindah tempat
   c. Pembuatan dispensasi nikah
   d. Pembuatan PPAT
   e. Pelayanan Hak Waris
   f. Pelayanan rekomendasi kredit bank
   g. Pelayanan Legalisasi surat-surat

   Untuk jenis Pelayanan mencapai 87,05%.

6. Kompetensi Pelaksana (U6)

   Kompetensi Pelaksana akan terus ditingkatkan dengan mengikuti Bimtek dan Sosialisasi, terealisasi 87,35%.

7. Perilaku Pelaksana (U7)

   Didalam melayani Masyarakat selalu bersikap ramah dan sopan serta berusaha memberikan pelayanan yang terbaik, perilaku pelayanan terealisasi 94,22%.

8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan (U8)

   Penanganan pengaduan sudah dilaksanakan dan ditanggapi berdasarkan pengaduan yang masuk dari kotak saran maupun yang masuk ke SP4N LAPOR terealisasi 97,08%.

9. Sarana dan Prasarana (U9);

   Sarana dan prasarana yang tersedia di Kecamatan Nganjuk sudah tersedia dengan kondisi yang baik terealisasi 87,77%.

Capaian indikator sasaran dapat diperoleh dengan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yaitu melalui Aplikasi e-SUKMA dan strategi menindak lanjuti peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dan diselesaikan dengan baik;

- ***Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan***

  Angka Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan yang ditindak lanjuti diperoleh dari : jumlah pelanggaran yang ditindaklanjuti di tahun 2023 dikurangi pelanggaran yang ditindaklanjuti tahun 2024 dibagi pelanggaran yang ditindaklanjuti tahun 2023 dikalikan 100%.

  Realisasi kinerjanya = $\frac{6-4}{6}$ x 100% = 33,33%

  Capaian kinerjanya = $\frac{\text{realisasi}}{\text{Target}}$ x 100% = $\frac{33,33\%}{30\%}$ x 100% = 111%

  Dengan hasil diatas terjadi penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan sehingga dapat dikatakan capaian memenuhi target yang telah ditetapkan/tercapai.

  Capaian kinerjanya sudah tercapai namun masih perlu adanya koordinasi kegiatan penanganan pelanggaran trantibum di kecamatan Nganjuk bersama tokoh masyarakat, perlu adanya koordinasi dengan pihak terkait yaitu forpimcam dan perlu untuk secara kontinyu mengadakan sosialisasi tentang trantibum.

A.2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun tahun sebelumnya

Tabel 3.1.2.1

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024, Tahun 2023, Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja				Realisasi Kinerja			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Tujuan Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan	Indeks sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	-	-	-	85,58	-	-	-	86,70
2.	Sasaran Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84	85	86	86,09	84.06	85.96	89.91	89,27
3.	Sasaran Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	-	-	-	30%	-	-In	-	33,33%

Tabel 3.1.2.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023, Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja			Realisasi Kinerja		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Sasaran Meningkatnya efektifitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, dan Pembinaan Pemerintahan Desa/ Kelurahan dan ketertiban	Prosentase koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum, kesejahteraan masyarakat, sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat yang ditindak lanjuti	95%	96%	97%	91%	95%	98%
3.	Sasaran Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Prosentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik	96%	97%	98%	95%	96%	100%

Pada table diatas dijelaskan bahwa ada perbedaan indicator kinerja dari tahun 2024 dan tahun sebelumnyapada dokumen perencanaan, sehingga tidak bisa dibandingkan antara tahun berkenaan dengan tahun sebelumnya kecuali indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang mana dari tahun 2021 sampai 2023 ada kenaikan target dan realisasi, pada tahun 2023 ke tahun 2024 ada kenaikan target namun ada penurunan realisasi yang disebabkan masyarakat yang menggunakan pelayanan di kecamatan lebih sedikit dari tahun 2023, sehingga yang mengisi Aplikasi e-Sukma mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena masyarakat yang meskipun tercapai 100% dari target di tahun 2024.

A.3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target Akhir pada Dokumen Restra

Tabel 3.1.3.1
Target Kinerja Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra		
			2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Tujuan Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan	Indeks sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	85,58	85,58	85,58
2.	Sasaran 1 Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,09	86,09	86,09

3.	Sasaran 2 Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	30%	30%	30%

Tabel 3.1.3.2
Perbandiangan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun Akhir Renstra	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Tingkat Kemajuan (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Tujuan Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan	Indeks sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	85,58	86,70	101%
2	Sasaran 1 Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86.09	89,27	104%
3	Sasaran 2 Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	30%	33,33%	111%

Dari tabel diatas maka :

1. Indeks sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan

   Realisasi pada tahun 2024 sebesar 86.70 dibandingkan dengan target akhir renstra yaitu 85.58. Maka dapat dikatakan bahwa relaisasi tahun 2024 lebih besar dibandingkan target tahun akhir renstra dengan tingkat kemajuan 101%. Sehingga hal tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan target selanjutnya.

2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

   Realisasi pada tahun 2024 sebesar 89.27 dibandingkan dengan target akhir renstra yaitu 86.09. Maka dapat dikatakan bahwa relaisasi tahun 2024 lebih besar dibandingkan target tahun akhir renstra dengan tingkat kemajuan 104%. Sehingga hal tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan target selanjutnya.

3. Persentase Penurunan Pelanggaran Kentrentaman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan

   Realisasi pada tahun 2024 sebesar 33.33% dibandingkan dengan target akhir renstra yaitu 30%. Maka dapat dikatakan bahwa relaisasi tahun 2024 lebih besar dibandingkan target tahun akhir renstra dengan tingkat kemajuan 111%. Sehingga hal tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan target selanjutnya.

A.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Berkenan (n) dengan Standard Nasional (Minimal dengan Regional/Provinsi/Kabupaten yang berbatasan)

Tabel 3.1.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun (n) dengan Standard Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Standard Nasional	Realisasi Kinerja Tahun
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Tujuan Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan	Indeks sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	67,48	86,70
2.	Sasaran 1 Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,39	89,27
3.	Sasaran 2 Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	0,0988	33,33%

Analisa dari table Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Standar Nasional dapat disimpulkan bahwa :

1. Realisasi kinerja indeks sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan pada tahun 2024 adalah 86,70 dibandingkan dengan nilai rata-rata sinergitas di wilayah Kabupaten Nganjuk sebesar 67,48; Kecamatan Nganjuk berada di atas nilai rata-rata sinergitas Kabupaten Nganjuk. Maka dapat dikatakan Sinergitas Kinerja Kecamatan (SKK) sudah optimal dan mendapatkan peringkat pertama yang didorong dengan inovasinya yaitu RT Cantik.
2. Realisasi kinerja sasaran yang pertama yaitu IKM Kecamatan Nganjuk tahun 2024 adalah 89,27 dibandingkan dengan IKM Provinsi Jawa Timur sebesar 88,39, Kecamatan Nganjuk masih diatas standart Nasional. Maka dapat dikatakan kinerja dalam pelayanan publik sudah optimal.

Untuk kedepannya Kecamatan Nganjuk akan meningkatkan pelayanan masyarakat sehingga harapannya Standar Pelayanan di Kecamatan Nganjuk mampu menyesuaikan dengan Standar Provinsi Jawa Timur.

3. Realisasi Kinerja sasaran strategis yang kedua Meningkatkan Ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan Nganjuk dari Tahun 2024 sebesar 33,33%, dibandingkan dengan trantibum standar Nasional yang bersumber dari Data dari Trantibum Kemendagri dengan bobot : 0,0988 dengan demikian kecamatan Nganjuk jumlah pelanggaran gangguan trantibum mengalami penurunan sehingga dapat tercipta keamanan dan ketertiban masyarakat. Untuk kedepannya lebih insentif untuk Koordinasi dan sosialisasi tentang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di wilayah Kecamatan Nganjuk dengan pihak-pihak terkait.

A.5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tabel 3.1.5

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Tercapai/ Tidak Tercapai
1	2	3			4	5
1	Tujuan Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan	Indeks sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	85,58	86,70	101%	Tercapai
2	Sasaran 1 Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86.09	89,27	104%	Tercapai
3	Sasaran 2 Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	30%	33,33%	111%	Tercapai

Analisa Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam capaian indeks sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan Nganjuk pada tahun 2024 realisasi kinerjanya sebesar 86,70 dari target kinerja

sebesar 85,58 dengan capaian kinerja sebesar 101% maka dapat dikatakan tercapai/ berhasil. Hal ini dapat dicapai dengan nilai tertinggi yang didorong oleh inovasi kecamatan Nganjuk yaitu RT Cantik.

2. Sasaran yang kesatu Capaian IKM di kecamatan Nganjuk pada tahun 2024 realisasi kinerjanya sebesar 89,27% dari target kinerja sebesar 86,09% dengan capaian kinerja sebesar 104% maka dapat dikatakan tercapai. Hal ini dikarenakan Kecamatan Nganjuk telah melaksanakan pelayanan kepada masyarakat khususnya di Lingkungan Kecamatan Nganjuk dengan baik, dengan Visi Misi Pelayanan yaitu:

   Visi : Terwujudnya model pelayanan publik responsif dan akuntabel.

   Misi nya :

   1. Optimalisasi Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan;
   2. Melaksanakan giat pemberdayaan masyarakat dalan perencanaan pembangunan yang terpadu dan aspiratif;
   3. Membangun koordinasi kerjasama dan kolaborasi kewenangan forpimcam dan pemerintahan kelurahan/ pemerintahan desa dan forpimkel/ forpimdes.

   Selain visi dan misi tersebut diatas, penyebab Keberhasilan dalam pelayanan masyarakat di kecamatan Nganjuk di antaranya adalah :

   a. Dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sudah sesuai dengan SOP;
   b. Dalam memberikan pelayanan di lakukan dengan senyum, sapa dan sabar sehingga masyarakat merasa dilayani dengan baik;
   b. Dilakukan komunikasi dengan baik dengan pemohon apabila persyaratan kurang lengkap.

3. Sasaran yang kedua meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan pada tahun 2024 terealisasi kinerjanya sebesar 33,33% dari target kinerjanya 30 % dengan capaian kinerjanya sebesar 111%, maka dapat dikatakan bahwa target sudah tercapai. Penyebab keberhasilan dalam mencipkatan penurunan gangguan trantibun di wilayah Kecamatan Nganjuk dikarenakan terciptanya keharmonisan antara Forpimcam, Pemerintah Desa dan tokoh masyarakat dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib. Upaya untuk tahun kedepan lebih ditingkatkan lagi dalam menekan gangguan trantibum di wilayah Kecamatan Nganjuk supaya lebih baik lagi dari tahun sebelumnya.

A.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.1.6
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Tujuan Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan	Indeks sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	101%	-	-
2	Sasaran 1 Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	104%	94%	10
3	Sasaran 2 Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	111%	74,03%	36,97

Tingkat efisiensi = % capaian kinerja - % penyerapan anggaran

Dari tabel diatas maka :

1. Indeks Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
   Dikarenakan dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan hanya Sasaran, maka menyebabkan indeks sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan tidak memiliki Program Anggaran. Sehingga tidak bisa diukur tingkat efisiensi. Kedepan Kecamatan Nganjuk perlu melakukan perbaikan maupun evaluasi pada dokumen perencanaan.
2. Dari Sasaran ke satu Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi terpadu kepada masyarakat dengan capaian kinerja sebesar 104 % dan realisasi anggaran dari empat Program yang mendukung yaitu :
   1). Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 91,69 %
   2). Program Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebesar 87,59 %
   3). Program Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar 98,46%
   4). Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sebesar 98,26 %
   Rata rata dari empat Program tersebut sebesar 94 % sehingga dapat diperoleh efisiensi dengan formula capaian dikurangi dengan realisasi = 104% – 94% = 10%. Hal ini menunjukkan komitmen yang sangat tinggi di Kecamatan Nganjuk dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

A.7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan /Kegagalan pencapaian Kinerja

Tabel 3.1.7
Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Realisasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (%)	Keterangan	Faktor Penyebab dan Upaya Penyelesaian
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Tujuan Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan	Indeks sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan			85,58	86,70	101%	Penilaian dari Sekda Kab. Nganjuk	-
2	Sasaran 1 Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)	Nilai SAKIP Kecamatan Nganjuk	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Nilai SAKIP Kecamatan Nganjuk**	86,09	89,27	104%	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat tersebut menggunakan 9 unsur yaitu : U1(kesesuaian Persyaratan dengan jenis Pelayanan=86,18;U2(Prosedur Pelayanan)=86,57;U3(Waktu dlm memberikan Pelayanan)=85,73;U4(Biaya Pelayanan)=99,58;U5(Standar Pelayanan yang diberikan)=87,08;U6(Kompetensi Petugas Pelayanan)=87,35;U7(Perilaku Petugas Pelayanan)=94,22;U8(Penanganan Pengaduan)=97,08;U9(Kualitas Sarpras Kecamatan)=87,77.	-

3			**Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	100%	100%	100%	Tercukupinya 8 Laporan di Sub Kegiatan dengan Indikator Kinerja Jumlah Laporan Capaian Kinerja	
4			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	8 Laporan	8 Laporan	100%	1. Laporan Evaluasi Hasil Perencanaan Perangkat Daerah Tribulan I Tahun 2024 Kec Nganjuk 2. Laporan Renja Tahun 2024 3. Laporan Renja Perubahan Tahun 2024 4. Laporan Evaluasi Hasil Perencanaan Perangkat Daerah Tribulan II Tahun 2024 Kec Nganjuk 5. Laporan Evaluasi Hasil Perencanaan Perangkat Daerah Tribulan III Tahun 2024 Kec Nganjuk 6. Laporan Evaluasi Hasil Perencanaan Perangkat Daerah Tribulan IV Tahun 2024 Kec Nganjuk 7. Laporan Data Perhitungan Gaji Tahun berikutnya 8. Laporan Ikhtisar Realisasi Anggaran Kecamatan Nganjuk	
5			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun**	100%	100%	100%	Tercukupinya Kegiatan dan Sub Kegiatan di Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
6			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji yang dibayarkan	85 orang x 12	85 orang x 12	100%	Daftar Gaji dan penerimaan Gaji masing-masing ASN	

7			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 Dokumen SPJ GU	
8			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun Perangkat Daerah yang disusun	1 Laporan	1 Laporan	100%	1. Laporan Keuangan	-
9			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran Perangkat Daerah yang disusun	2 Laporan	2 Laporan	100%	Laporan Semesteran	
10			**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya**	20 Paket	0	0	Paket pengadaan	Dikarenakan di tahun 2023 telah melaksanakan pengadaan sehingga tidak dilaksanakan di tahun 2024
11			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase fasilitasi dan koordinasi bagian umum yang dilaksanakan perangkat daerah**	100%	78,57%	78,57%		Dikarenakan di Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu terjadi kesalahan pelaksanaan administrasi pada kunjungan tamu dari kabupaten Tapin Kalsel sehingga 1 laporan tidak dapat disusun
12			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan	1 Paket	1 paket	100%	Paket Penyediaan Komponen instalasi listrik/ penerangan	

			Bangunan Kantor	kantor yang tersedia						
13			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK dan mamin pegawai dan alat kebersihan yang tersedia	12 Paket	12 Paket	100%	12 Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Mamin kantor		
14			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket yang disediakan	1 Paket	1 paket	100%	1 Paket Cetak Buku Agenda		
15			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang tersedia	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan		
16			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	2 Laporan	1 Laporan	50%	Laporan jumlah Tamu yang berkunjung ke Kecamatan Nganjuk dari Praja IPDN Jatinangor.	Dikarenakan kesalahan pelaksanaan administrative pada kunjungan tamu dari kabupaten Tapin Kalsel sehingga 1 laporan tidak dapat disusun	
17			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah ASN yang melaksanakan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan Perjalanan Dinas		
8			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip yang dikelola dengan baik	1 dokumen	1 dokumen	100%	Dokumen Pengawasan Internal Kearsipan		
9			**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah**	100%	100%	100%			

			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan setiap bulan Asset yang ada di kec Nganjuk	
20			**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase barang milik daerah SKPD yang diadakan**	100%	100%	100%		
21			Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	1 paket	1 paket	100%	Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Barang Pembelian 1 buah Almari	
22			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang diadakan	3 Unit	3 unit	100%	BAST Pengadaan Barang : 1. Pembelian PC, 2. Pembelian Printer dan 3. Pembelian Laptop	
23			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia**	100%	100%	100%		
24			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa paket/pengiriman surat menyurat	1 Laporan	1 laporan	100%	1. Laporan Agenda Masuk dan Agenda Keluar	
25			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi dan listrik yang tersedia	4 Laporan	4 Laporan	100%	Laporan rekap jasa komurikasi yang tersedia per Triwulan	
26			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	12 laporan	100%	Laporan Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	
27			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah SKPD yang dipelihara**	100%	75,56%	75,56%		
8			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang	3 Unit	3 Unit	100%	1. Mobil Toyota Velos yang terawat 2. Sepeda Motor Verza yang	

			dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	terawat				terawat 3. Sepeda Motor Honda yang terawat		
29			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan yang dipelihara	15 Unit	4 Unit	26,67%	Jumlah jenis peralatan yang dipelihara dengan Servis rutin Kendaraan bermotor	Mobil Dinas ada pergantian dari Panther Putih menjadi Veloz terbaru sehingga tingkat servis minim karena mesin baru	
30			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terawat	1 Unit	1 Unit	100%	1. BAST 1 unit Pengecatan Pagar Kantor Kec		
31	Sasaran 1 Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Tingkat kegiatan pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan dengan tertib**	100%	87,59%	87,59%			
2			**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	2 Laporan	2 Laporan	100%%			
3			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi / sinergi perencanaan.	2 Laporan	2 Laporan	100%	1. Laporan kegiatan Monitoring Pajak PBB di Kelurahan Bulan November 2024. 2. Laporan kegiatan Monitoring Pajak PBB di Kelurahan Bulan Desember 2024		
			Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan	**Jumlah Laporan Koordinasi Pemeliharaan**	1 dokumen	0 dokumen	0%		Yang dijalankan hanya SPJ ATK. Maka kedepannya	

			Sarana Pelayanan Umum	**Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**					akan dilakukan kegiatan pelayanan umum d bidang sarpras se-kecamatan nganjuk
35			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah dokumen kegiatan bidang sarana dan prasarana Pelayanan Umum yang tersusun	1 Dokumen	0 Dokumen	0%		Yang dijalankan hanya SPJ ATK. Maka kedepannya akan dilakukan kegiatan pelayanan umum di bidang sarpras se-kecamatan nganjuk
36			**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**	**Jumlah Laporan Pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan**	4 Laporan	4 Laporan	100 %		
37			Pelaksaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah warga yang mendapat pelayanan	4 Laporan	4 Laporan	100%	1. Laporan Jumlah Warga yang dilayani dalam mengurus Kependudukan 2. Laporan Jumlah Warga yang meminta legalitas kemiskinan 3. Laporan Jumlah Warga yang meminta legalitas Model DK 4. Laporan Jumlah Warga yang minta penyelesaian kewarisan	
38	Sasaran 1 Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan**	100%	100%	100%		
39			**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan**	100%	100%	100%		

				Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan					
40			Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kecamatan	Jumlah Dokumen Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	1. Dokumen Kegiatan PKK Kecamatan. 2. Dokumen Kegiatan Penilaian RT Cantik.	
41			**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**	100%	100%	100%	Tercukupinya	
42			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi masyarakat dalam musrenbangkel	5 Lembaga Kemasy	5 Lembaga Kemasy	100%	Musrenbang Kecamatan yang dihadiri 5 Lembaga Kemasyarakatan : 1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 2. Badan Permusyawaratan Desa 3. Pemberdayan Kesejahteraan Keluarga 4. Rukun Warga 5. Rukun Tetangga	
43			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarpras yang terbangun	3 Unit	3 unit	100%	1. BAST Pavingisasi Gedung Pertemuan / Posyandu Lingkungan Jarakan; 2. BAST Rehabilitasi Pagar Gedung pertemuan/ posyandu Lingkungan Mantup; 3. BAST Rehabilitasi Pagar Gedung pertemuan/ posyandu Lingkungan Mantup;	

44			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masy di Kelurahan	2 Pokmas	2 pokmas	100%	1. Sosialisasi Kelurahan Perda No. 06 th 2023 Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pencegahan Penanggulangan Bencana Kebakaran, 2. Sosialisasi Kelurahan Berseri bersinar th 2024	
45	Sasaran 2 Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	**Program Koordinasi Ketentraman dan KetertibanUmum**	**Persentase permasalahan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani**	100%	100%	100%		
46			**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah laporan hasil koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**	12 Laporan	12 Laporan	100%		
47			Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan sinergitas dengan kepolisian dan TNI	12 Laporan	12 Laporan	100%	Laporan setiap bulan kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian dan TNI	
48	Sasaran 1 Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Persentase Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan**	100%	80%	80%		
49			**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan**	75 orang	45 orang	80%		

				pemerintahan di Kecamatan					
			Pembinaan Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Pemantapan Pengamanan Pancasila Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Pelestarian Bhinika Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah warga/lembaga yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan	75 orang	45 orang	80%	1. Daftar Hadir Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	Telah mengundang 75 orang akan tetapi yang hadir hanya sampai dengan 45 orang. Kedepannya akan lebih aktif untuk mengajak warga dalam mengikuti pembinanan kebangsaan
50	Sasaran 1 Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Desa/ Kelurahan cepat berkembang**	100%	100%	100%		
51			**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	100%	100%	100%		
52			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen Kegiatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	2 Dokumen	2 dokumen	100%	1. Dokumen Monitoring Penyerapan APBDesa Balongpacu dan Kedungdowo; 2. Dokumen Pembinaan Keuangan terkait transaksi non tunai untuk Desa Balongpacul dan Desa Kedungdowo	
53			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah dokumen kegiatan fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1. Dokumen APB Desa	

Dari tabel diatas :

- Sinergitas Kecamatan

  Tidak ada Program dan kegiatan yang menunjang ketercapaian nilai sinergitas kecamatan. Karena pada dokumen Perjanjian Kinerja Camat Nganjuk.

- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

  Program dan kegiatan yang menunjang Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) :

  - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan Target 86,09% teralisasi 89,27% yang terpenuhi oleh kegiatan :
    - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dari target 100% terealisasi 100%.
    - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dari target 100% terealisasi 100%.
    - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dari target 20 paket terealisasi 0%.
    - Administrasi Umum Perangkat Daerah dari target 100% terealisasi 78,57%.
    - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dari target 100% terealisasi 100%.
    - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dari target 100% terealisasi 100%.
    - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dari target 100% terealisasi 100%.
    - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan dari target 100% terealisasi 75,56%.
  - Program Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan target 100% terealisasi 87,59%.yang terpenuhi oleh kegiatan :
    - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dari target 100% terealisasi 100%.
    - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum dari target 100% terealisasi 0%.
    - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dari target 100% terealisasi 100%.
  - Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan target 100% terealisasi 100% yang terpenuhi oleh kegiatan :
    - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dari target 100% terealisasi 100%.
    - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan dari target 100% terealisasi 100%.

- Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan target 100% terealisasi 100%.yang terpenuhi oleh kegiatan :
  - Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintaahan Desa dari target 100% terealisasi 100%.

3. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan
   - Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan target 100% terealisasi 100%.yang terpenuhi oleh kegiatan :
     - Koordinasi Upaya Penyelenggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum dari target 100% terealisasi 100%.
   - Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
     - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dari target 100% terealisasi 80%.

B. Realisasi Anggaran

Tabel 3.2
Realiasi Anggaran Tahun 2024

No.	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Penyerapan Anggaran (%)	Faktor penyebab dan Upaya
1	2	3	4	5	6	
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**17,471,906,570.00**	**16,020,475,168.90**	**1,451,431,401.10**	**91.69**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**4,000,000.00**	**3,692,000.00**	**308,000.00**	92.30	Untuk lembur Pejabat Eselon 2 dan 3 tidak bisa memenuhi jam yang tersedia
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4,000,000.00	3,692,000.00	308,000.00	92.30	
	Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah	**13,369,462,300.00**	**12,089,240,077.00**	**1,280,222,223.00**	90.42	Masih ada jabatan kosong, ada PNS yang pension dan PNS yang meninggal
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12,846,771,000.00	11,574,464,177.00	1,272,306,823.00	90.10	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	39,780,000.00	39,780,000.00	-	100	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD (Jatirejo)	41,960,000.00	41,834,000.00	126,000.00	99.70	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD (Begadung)	36,060,000.00	36,052,500.00	7,500.00	99.98	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verfikasi Keuangan SKPD (Bogo)	36,060,300.00	35,580,000.00	480,300.00	98.67	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD (Cangkringan)	35,580,000.00	35,580,000.00	-	100	
	Pelaksanaan Penata Usahaan dan Pengujian/ Verivikasi keuangan SKPD (Ganungkidul)	35,580,000.00	35,580,000.00	-	100	
	Pelaksanaan Penata Usahaan dan Pengujian/ Verivikasi keuangan SKPD (Kartoharjo)	35,580,000.00	35,400,000.00	180,000.00	99.49	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD (Kauman)	36,816,000.00	36,816,000.00	-	100	
	Pelaksanaan Penata Usahaan dan Pengujian/ Verivikasi keuangan SKPD (Kramat)	36,180,000.00	36,180,000.00	-	100	

	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD (Mangundikaran)	38,280,000.00	35,580,000.00	2,700,000.00	92.95	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD (Payaman)	36,080,000.00	35,969,000.00	111,000.00	99.69	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD (Ploso)	39,880,000.00	35,980,000.00	3,900,000.00	90.22	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/ Verifikasi Keuangan SKPD (Ringinanom)	35,855,000.00	35,795,400.00	59,600.00	99.83	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/ Verifikasi Keuangan SKPD (Werungotok)	36,000,000.00	36,000,000.00	-	100	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2,000,000.00	1,676,500.00	323,500.00	83.83	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1,000,000.00	972,500.00	27,500.00	97.25	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**82,719,500.00**	**82,364,500.00**	**355,000.00**	99.57	Honor Pengurus Barang yang non ASN berbeda honornya jadi tidak bisa terserap habis
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6,000,000.00	6,000,000.00	-	100	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Jatirejo)	6,100,000.00	6,100,000.00	-	100	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD (Begadung)	6,090,000.00	6,085,000.00	5,000.00	99.92	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD (Bogo)	6,099,900.00	6,000,000.00	99,900.00	98.36	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Cangkringan)	6,042,000.00	6,042,000.00	-	100	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD (Ganungkidul)	6,000,000.00	6,000,000.00	-	100	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD (Kartoharjo)	6,000,000.00	5,750,000.00	250,000.00	95.83	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Kauman)	6,500,000.00	6,500,000.00	-	100	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD (Kramat)	6,060,000.00	6,060,000.00	-	100	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Mangundikaran)	6,000,000.00	6,000,000.00	-	100	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD (Payaman)	6,078,000.00	6,078,000.00	-	100	

	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD (Ploso)	6,000,000.00	6,000,000.00	-	100	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD (Ringinanom)	6,150,000.00	6,150,000.00	-	100	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD (Werungotok)	3,599,600.00	3,599,500.00	100.00	100	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	-	Karena di tahun 2023 sudah menyerap pengadaan pakaian dinas di Tribulan IV maka di tahun 2024 tidak ada pengadaan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**691,771,642.00**	**661,677,084.00**	**30,094,558.00**	95.65	ATK, Komponen Listrik dan Alat Kebersihan yang diserap hanya yang sesuai kebutuhan
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	2,499,392.00	2,478,500.00	20,892.00	99.16	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor (Jatirejo)	15,455,776.00	15,455,000.00	776.00	99.99	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Begadung)	1,824,400.00	1,824,400.00	-	100	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Bogo)	1,280,000.00	1,280,000.00	-	100	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerapan Bangunan Kantor (Cangkringan)	792,800.00	787,500.00	5,300.00	99.33	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Ganungkidul)	1,100,000.00	1,100,000.00	-	100	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kartoharjo)	1,080,000.00	1,080,000.00	-	100	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kauman)	1,500,000.00	1,500,000.00	-	100	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kramat)	1,255,000.00	1,255,000.00	-	100	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Mangundikaran)	930,500.00	930,500.00	-	100	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Payaman)	1,162,800.00	1,162,800.00	-	100	

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Ringinanom)	1,200,400.00	1,200,000.00	400.00	99.97	
	Penyediaan Komponen Inatalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor (Werungotok)	1,202,700.00	1,202,700.00	-	100	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Jatirejo)	76,260,000.00	76,228,000.00	32,000.00	99.96	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Bogo)	23,134,350.00	23,134,350.00	-	100	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Cangkringan)	-	-	-		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kartoharjo)	17,205,100.00	15,115,000.00	2,090,100.00	87.85	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (kauman)	4,575,500.00	4,575,500.00	-	100	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kramat)	2,180,900.00	2,145,000.00	35,900.00	98.35	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Mangundikaran)	-	-	-		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Ploso)	17,395,394.00	17,254,394.00	141,000.00	99.19	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Ringinanom)	15,400,000.00	15,300,000.00	100,000.00	99.35	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Werungotok)	25,530,000.00	25,530,000.00	-	100	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35,603,090.00	31,385,000.00	4,218,090.00	88.15	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Jatirejo)	20,831,000.00	20,819,000.00	12,000.00	99.94	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Begadung)	18,332,230.00	17,398,230.00	934,000.00	94.91	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Bogo)	35,049,850.00	30,909,750.00	4,140,100.00	88.19	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Cangkringan)	23,329,400.00	23,171,850.00	157,550.00	99.32	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Ganungkidul)	14,692,510.00	11,913,410.00	2,779,100.00	81.08	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kartoharjo)	19,148,100.00	19,138,800.00	9,300.00	99.95	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kauman)	17,038,900.00	16,890,900.00	148,000.00	99.13	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kramat)	16,597,200.00	16,551,500.00	45,700.00	99.72	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Mangundikaran)	20,191,010.00	19,504,010.00	687,000.00	96.60	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Payaman)	16,086,740.00	15,989,940.00	96,800.00	99.40	

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Ploso)	35,000,000.00	33,908,200.00	1,091,800.00	96.88	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Ringinanom)	23,442,950.00	22,391,000.00	1,051,950.00	95.51	
	Penyediaan Bahan 46ogistic Kantor (Werungotok)	11,121,100.00	11,121,100.00	-	100	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2,500,000.00	800,000.00	1,700,000.00	32	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Jatirejo)	4,911,000.00	4,911,000.00	-	100	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Begadung)	4,190,600.00	3,487,600.00	703,000.00	83.22	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Bogo)	3,514,700.00	2,152,150.00	1,362,550.00	61.23	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Cangkringan)	1,531,500.00	1,531,500.00	-	100	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Ganungkidul)	845,500	625,000	220,500.00	73.92	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Kartoharjo)	1,500,000.00	1,385,000.00	115,000.00	92.33	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan(Kauman)	4,167,800.00	4,167,800.00	-	100	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Kramat)	3,114,900.00	3,105,000.00	9,900.00	99.68	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Mangundikaran)	3,438,550.00	3,438,550.00	-	100	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Payaman)	2,059,000.00	2,031,800.00	27,200.00	98.68	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Ringinanom)	1,773,200.00	1,750,000.00	23,200.00	98.69	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan (Werungotok)	2,146,800.00	2,146,800.00	-	100	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3,000,000.00	2,400,000.00	600,000.00	80.00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Jatirejo)	2,400,000.00	2,400,000.00	-	100	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Begadung)	2,400,000.00	2,400,000.00	-	100	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Bogo)	2,400,000.00	2,400,000.00	-	100	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan (Cangkringan)	2,400,000.00	2,400,000.00	-	100	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Kartoharjo)	2,400,000.00	2,400,000.00	-	100	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Kauman)	3,000,000.00	3,000,000.00	-	100	

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan (Mangundikaran)	2,400,000.00	2,400,000.00	-	100	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan (Payaman)	2,400,000.00	2,400,000.00	-	100	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan (Ploso)	3,900,000.00	3,870,000.00	30,000.00	99.23	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Ringinanom)	1,800,000.00	1,800,000.00	-	100	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Werungotok)	1,800,000.00	1,800,000.00	-	100	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2,500,000.00	612,500.00	1,887,500.00	24.50	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu (cangkringan)	962,500.00	916,250.00	46,250.00	95.19	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu (Ganungkidul)	1,100,000.00	1,079,100.00	20,900.00	98.10	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu (kauman)	1,920,000.00	1,867,250.00	52,750.00	97.25	
	Fasilitasi kunjungan Tamu (Ringinanom)	1,125,000.00	180,000.00	945,000.00	16.00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36,380,000.00	36,203,000.00	177,000.00	99.51	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Jatirejo)	2,637,500.00	2,637,500.00	-	100	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Begadung)	45,600,000.00	43,831,000.00	1,769,000.00	96.12	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Bogo)	2,100,000.00	1,027,500.00	1,072,500.00	48.93	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kauman)	4,200,000.00	4,052,950.00	147,050.00	96.50	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Mangundikaran)	6,750,000.00	5,386,500.00	1,363,500.00	79.80	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1,074,000.00	1,050,000.00	24,000.00	97.77	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**398,140,278.00**	**380,715,000.00**	**17,425,278.00**	95.62	Belanja Barang yang di e-katalog tidak sesuai Anggaran yang tersedia
	Pengadaan Mebel	4,000,000.00	4,000,000.00	-	100	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37,984,000.00	35,940,000.00	2,044,000.00	94.62	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Begadung)	17,205,000.00	17,090,000.00	115,000.00	99.33	
	Pengadaan Mebel (Mangundikaran)	10,989,000.00	10,989,000.00	-	100	

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Cangkringan)	55,875,600.00	50,595,000.00	5,280,600.00	90.55	
	Pengadaan peralatan dan Mesin Lainnya (Ganungkidul)	39,588,550	36,740,000	2,848,550	92.80	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kartoharjo)	33,112,000.00	33,112,000.00	-	100	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kauman)	25,184,750.00	25,115,000.00	69,750.00	99.72	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kramat)	13,130,000.00	12,125,000.00	1,005,000.00	92.35	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Mangundikaran)	12,761,448.00	12,654,000.00	107,448.00	99.16	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Payaman)	49,739,100.00	48,440,000.00	1,299,100.00	97.39	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Ploso)	57,944,300.00	55,975,000.00	1,969,300.00	96.60	
	Pengadaan peralatan dan Mesin Lainnya (Ringinanom)	22,186,100.00	22,140,000	46,100.00	99.79	
	Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya (Werungotok)	18,440,430.00	15,800,000.00	2,640,430.00	85.68	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**2,150,369,200.00**	**2,064,534,580.80**	**85,834,619.20**	96.01	Pembayaran Jasa Komunikasi dan Sumber Daya Air tidak terserap semuanya
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,320,000.00	1,302,000.00	18,000.00	98.64	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22,400,000.00	20,949,684.00	1,450,316.00	93.53	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Jatirejo)	13,550,000.00	9,260,070.00	4,289,930.00	68.34	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Begadung)	26,020,000.00	24,881,870.00	1,138,130.00	95.63	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Bogo)	12,000,000.00	11,471,000.00	529,000.00	95.59	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Cangkringan)	6,000,000.00	5,981,888.00	18,112.00	99.70	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Ganungkidul)	4,740,000	3,539,500	1,200,500.00	74.67	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kartoharjo)	7,290,000.00	7,259,722.00	30,278.00	99.58	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kauman)	13,800,000.00	13,020,367.00	779,633.00	94.35	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kramat)	20,400,000.00	18,226,666.00	2,173,334.00	89.35	
	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumberdaya Air dan Listrik (Mangundikaran)	12,000,000.00	11,960,000.00	40,000.00	99.67	

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Payaman)	22,200,000.00	20,199,089.00	2,000,911.00	90.99	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Ploso)	51,700,000.00	37,027,415.00	14,672,585.00	71.62	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Ringinanom)	7,000,000.00	4,117,163.00	2,882,837.00	58.82	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik (Werungotok)	6,000,000.00	5,991,780.00	8,220.00	99.86	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Ganungkidul)	30,500,000	30,500,000	-	100	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	176,058,000.00	175,246,333.80	811,666.20	99.54	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Jatirejo)	148,584,000.00	146,639,405.00	1,944,595.00	98.69	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Begadung)	104,512,000.00	98,182,412.00	6,329,588.00	93.94	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Bogo)	157,172,000.00	146,597,126.00	10,574,874.00	93.27	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Cangkringan)	108,942,000.00	105,797,813.00	3,144,187.00	97.11	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Ganungkidul)	122,541,000	120,116,129	2,424,871.00	98.02	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kartoharjo)	118,934,000.00	112,470,851.00	6,463,149.00	94.57	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kauman)	135,378,200.00	133,252,818.00	2,125,382.00	98.43	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kramat)	171,940,000.00	168,963,888.00	2,976,112.00	98.27	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Mangundikaran)	145,808,000.00	136,317,834.00	9,490,166.00	93.49	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Payaman)	112,042,000.00	110,538,073.00	1,503,927.00	98.66	
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor (Ploso)	134,262,000.00	132,650,035.00	1,611,965.00	98.80	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Ringinanom)	115,461,000.00	110,432,829.00	5,028,171.00	95.65	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Werungotok)	141,815,000.00	141,640,820.00	174,180.00	99.88	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**775,443,650.00**	**738,251,927.10**	**37,191,722.90**	95.20	Tidak terserap karena Mobil Phanter Putih ditarik dan diganti mobil Veloz baru
	Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Ploso)	17,312,100.00	16,328,500.00	983,600.00	94.32	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	28,917,400.00	18,442,203.00	10,475,197.00	63.78	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Jatirejo)	13,255,000.00	11,788,500.00	1,466,500.00	88.94	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Begadung)	8,778,700.00	7,837,500.00	941,200.00	89.28	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Bogo)	16,604,500.00	14,598,500.00	2,006,000.00	87.92	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Cangkringan)	8,915,100.00	8,544,250.00	370,850.00	95.84	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Ganungkidul)	11,051,600	10,701,600	350,000	96.83	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Kartoharjo)	18,904,200.00	18,418,500.00	485,700.00	97.43	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Kauman)	9,676,600.00	9,483,600.00	193,000.00	98.01	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Kramat)	11,022,500.00	10,652,500.00	370,000.00	96.64	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Mangundikaran)	25,297,200.00	19,364,694.00	5,932,506.00	76.55	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Payaman)	7,063,600.00	7,004,500.00	59,100.00	99.16	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Ringinanom)	16,451,200.00	15,825,500.00	625,700.00	96.20	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Werungotok)	11,857,100.00	11,324,600.00	532,500.00	95.51	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4,630,000.00	4,540,000.00	90,000.00	98.06	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Jatirejo)	6,000,000.00	6,000,000.00	-	100	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Begadung)	3,800,000.00	3,110,000.00	690,000.00	81.84	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Bogo)	3,880,000.00	2,100,000.00	1,780,000.00	54.12	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Cangkringan)	1,900,000.00	1,900,000.00	-	100	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Ganungkidul)	6,150,000	6,150,000	-	100	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kartoharjo)	5,280,000.00	5,280,000.00	-	100	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (kauman)	6,000,000.00	6,000,000.00	-	100	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kramat)	3,850,000.00	3,850,000.00	-	100	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Mangundikaran)	3,800,000.00	3,800,000.00	-	100	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Payaman)	5,700,000.00	5,700,000.00	-	100	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Ploso)	7,850,000.00	7,400,000.00	450,000.00	94.27	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Ringinanom)	2,500,000.00	2,500,000.00	-	100	
	pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Werungotok)	3,000,000.00	3,000,000.00	-	100	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10,000,000	9,969,000.00	31,000.00	99.69	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Jatirejo)	62,106,000.00	61,050,000.00	1,056,000.00	98.30	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Begadung)	30,352,000.00	30,205,320.00	146,680.00	99.52	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Bogo)	50,000,000.00	49,900,000.00	100,000.00	99.80	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Cangkringan)	10,000,000.00	10,000,000.00	-	100	

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Ganungkidul)	30,000,000	29,890,000	110,000	99.63	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Kartoharjo)	36,000,000.00	35,887,774.10	112,225.90	99.69	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (kauman)	79,038,300.00	77,167,300.00	1,871,000.00	97.63	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Kramat)	21,680,000.00	21,641,000.00	39,000.00	99.82	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Mangundikaran)	57,032,000.00	52,024,823.00	5,007,177.00	91.22	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Payaman)	16,650,000.00	16,400,000.00	250,000.00	98.50	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Ploso)	13,020,050.00	12,710,000.00	310,050.00	97.62	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Ringinanom)	42,000,000.00	41,818,000.00	182,000.00	99.57	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Werungotok)	48,118,500.00	47,943,763.00	174,737.00	99.64	
2	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**	**63,356,450.00**	**55,493,200.00**	**7,863,250.00**	87.59	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**46,863,750.00**	**41,278,550.00**	**5,585,200.00**	88.08	Masih ada Kegiatan yang tidak terserap yaitu : Forum Kecamatan Sehat
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait	46,863,750.00	41,278,550.00	5,585,200.00	88.08	
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	**4,950,000.00**	**4,927,500.00**	**22,500.00**	99.55	Ada ATK yang tidak bisa terserap
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	4,950,000.00	4,927,500.00	22,500.00	99.55	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**11,542,700.00**	**9,287,150.00**	**2,255,550.00**	80.46	Masih ada Kegiatan yang tidak terserap yaitu : Persiapan Sinergitas Kecamatan
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	11,542,700.00	9,287,150.00	2,255,550.00	80.46	
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**4,431,592,479.00**	**4,364,534,897.00**	**67,057,582.00**	98.49	

	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	**388,801,520.00**	**366,961,100.00**	**21,840,420.00**	94.38	**Kegiatan Kelembagaan tidak dilaksanakan karena mendekati Pilkada**
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	338,144,900.00	316,335,100.00	21,809,800.00	93.55	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	50,656,620.00	50,626,000.00	30,620.00	99.94	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**4,042,790,959.00**	**3,997,573,797.00**	**45,217,162.00**	98.88	Tidak menyerap Anggaran Pra Musrenbang
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	14,887,800.00	13,941,250.00	946,550.00	93.64	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Jatirejo)	180,140,000.00	175,925,000.00	4,215,000.00	97.66	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Begadung)	300,462,465.00	300,168,000.00	294,465.00	99.90	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Bogo)	233,247,650.00	232,903,150.00	344,500.00	99.85	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Cangkringan)	276,919,300.00	276,661,650.00	257,650.00	99.91	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Ganungkidul)	215,215,600	208,738,000	6,477,600	96.99	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kartoharjo)	313,121,000.00	310,856,000.00	2,265,000.00	99.28	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kauman)	298,390,227.00	292,267,390.00	6,122,837.00	97.95	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kramat)	268,648,400.00	263,473,000.00	5,175,400.00	98.07	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Mangundikaran)	345,339,800.00	344,879,849.00	459,951.00	99.87	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Payaman)	214,764,970.00	214,338,200.00	426,770.00	99.80	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Ploso)	174,618,656.00	173,070,336.00	1,548,320.00	99.11	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Ringinanom)	300,789,305.00	300,347,000.00	442,305.00	99.85	
	Pembangunan Sarana dan Prasana Kelurahan (Werungotok)	209,220,133.00	208,933,282.00	286,851.00	99.86	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Jatirejo)	20,558,000.00	20,358,000.00	200,000.00	99.03	

	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Begadung)	28,071,270.00	27,100,000.00	971,270.00	96.54	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Bogo)	32,958,300.00	31,828,800.00	1,129,500.00	96.57	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Cangkringan)	63,955,050.00	64,247,400.00	(292,350.00)	100.46	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Ganungkidul)	127,286,789	125,416,000	1,870,789	98.53	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kartoharjo)	45,440,000.00	45,439,000.00	1,000.00	100	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kauman)	33,535,150.00	33,420,100.00	115,050.00	99.66	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kramat)	56,345,000.00	55,830,000.00	515,000.00	99.09	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Mangundikaran)	17,327,200.00	17,327,200.00	-	100	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Payaman)	51,749,500.00	51,472,000.00	277,500.00	99.46	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Ploso)	129,509,794.00	118,997,240.00	10,512,554.00	91.88	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Ringinanom)	29,177,550.00	28,774,000.00	403,550.00	98.62	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Werungotok)	61,112,050.00	60,861,950.00	250,100.00	99.59	
4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**17,609,850.00**	**11,914,750.00**	**5,695,100.00**	67.66	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**17,609,850.00**	**11,914,750.00**	**5,695,100.00**	67.66	Honor Forpimcam tidak terserap karena tidak bisa mencukupi SK nya
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	17,609,850.00	11,914,750.00	5,695,100.00	67.66	
5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**16,462,500.00**	**13,236,500.00**	**3,226,000.00**	80.40	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**16,462,500.00**	**13,236,500.00**	**3,226,000.00**	80.40	Pembelian Umbul-Umbul untuk Hari Kemerdekaan RI tidak terserap

	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	16,462,500.00	13,236,500.00	3,226,000.00	80.40	
6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**2,567,260,850.00**	**2,522,511,980.00**	**44,748,870.00**	98.26	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**2,567,260,850.00**	**2,522,511,980.00**	**44,748,870.00**	98.26	Honor Narsum tidak sesuai Pejabat yang hadir harusnya Eselon 2
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8,800,000.00	8,675,000.00	125,000.00	98.58	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	6,480,000.00	6,480,000.00	-	100	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Jatirejo)	223,374,400.00	222,774,400.00	600,000.00	99.73	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Begadung)	216,547,500.00	208,108,500.00	8,439,000.00	96.10	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Bogo)	168,522,500.00	163,470,750.00	5,051,750.00	97.00	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Cangkringan)	181,536,800.00	169,146,550.00	12,390,250.00	93.17	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Ganungkidul)	142,690,000	140,750,000	1,940,000	98.64	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Kartoharjo)	211,470,000.00	211,150,000.00	320,000.00	99.85	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Kauman)	148,093,000.00	144,963,500.00	3,129,500.00	97.89	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Kramat)	219,325,000.00	219,272,500.00	52,500.00	99.98	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Mangundikaran)	245,531,000.00	239,002,080.00	6,528,920.00	97.34	

	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Payaman)	275,765,000.00	269,743,000.00	6,022,000.00	97.82	
	Fasilitasi Pelaksanaan tugas , Fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Ploso)	134,282,500.00	134,145,000.00	137,500.00	99.90	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Ringinanom)	140,362,450.00	140,350,200.00	12,250.00	99.99	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Werungotok)	244,480,700.00	244,480,500.00	200.00	100	
JUMLAH		**24,568,188,699.00**	**22,988,166,495.90**	**1,580,022,203.10**	93.57	

Analisa atas capaian indikator-indikator sasaran adalah sebagai berikut : Program kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk pada tahun 2024 sebanyak 6 program dijabarkan dalam 16 kegiatan dan 31 Sub Kegiatan.

1. *Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*

   Hasil program ini adalah meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan Nganjuk, dengan anggaran Rp.17,471,906,570,00 realisasi Rp.16,020,475,168,00 atau penyerapan anggaran sebesar 91,69%,

2. *Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik*

   Hasil program ini adalah meningkatnya prosentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang ditindaklanjuti, dengan anggaran Rp.63,356,450,00 realisasi Rp.55,493,200,- atau penyerapan anggaran sebesar 87,59%

3. *Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan*

   Hasil dari program ini adalah meningkatnya Persentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan anggaran Rp.4,431,592,479,00 realisasi Rp. 4,363,434,897,00 atau penyerapan anggaran sebesar 98,46 %

4. *Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum*

   Hasil dari program ini adalah meningkatnya Prosentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dibidang ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti, dengan anggaran sebesar Rp.17,609,850,00 realisasi Rp.11,914,750,00 atau penyerapan anggaran sebesar 67,66 %

5. *Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum*

   Hasil program ini adalah meningkatnya Prosentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dibidang pemerintahan umum yang ditindaklanjuti, dengan anggaran Rp.16,462,500,00 realisasi Rp.13,236,500,00 atau penyerapan anggaran sebesar 80,40 %.

6. *Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*

   Hasil program ini adalah meningkatnya Persentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan anggaran Rp.2,567,260,850,00 realisasi Rp 2,522,511,980,00 atau penyerapan dana sebesar 98,26%

Untuk realisasi belanja Kecamatan Nganjuk pada tahun 2024 yaitu sebesar Rp.22.987.066.495,- atau sebesar 93,56% dari Pagu Anggaran Rp.24.568.188.699,- dari yang direncanakan.

Secara umum Capaian/Realisasi Program tahun 2024 dapat memenuhi target kinerja yang diharapkan dan sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja. Adapun faktor penyebab keberhasilan target kinerja antara lain :

a. Keberhasilan capaian kinerja ini adalah adanya kerjasama yang baik antara pemerintah kecamatan dengan instansi vertikal. Kerjasama tersebut berupa koordinasi, baik secara langsung maupun melalui rapat yang diselenggarakan oleh pihak kecamatan.
b. Efisiensi penggunaan sumber daya

   Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait yaitu Forpimcam, Korwil, UPT, Desa dan Kelurahan dalam melaksanakan ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan masyarakat, dan pemerintahan desa/kelurahan.
c. Pemberdayaan potensi sumber daya yang ada seoftimal mungkin, sehingga target kinerja dapat tercapai;
d. Tercukupinya personel dan pejabat yang membidangi sudah terisi pada Tahun Anggaran berkenan.

BAB IV
PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Kecamatan Nganjuk merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Kecamatan Nganjuk dengan mengacu pada Renstra Kecamatan Nganjuk Tahun 2024-2026.

Sebagai instansi yang mempunyai tugas umum pemerintahan dalam lingkup Kecamatan telah mampu menjalankan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya. Hal ini tampak pada pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 semua indikator sudah dapat memenuhi target yang ditetapkan yang meliputi :

1. Meningkatnya Sinergitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan;
2. Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)
3. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan

4.2. SARAN

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja perlu upaya yang dilakukan agar kinerja Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, meningkat menjadi lebih baik dan akuntabel antara lain :

2. Melakukan Re-orientasi terhadap program/kegiatan yang kurang tepat sasaran dan sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan dan kinerja
3. Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan;
4. Memberdayakan sumber daya yang ada di Kecamatan Nganjuk secara menyeluruh,efektif, dan efesien;
3. Menguatkan komitmen dari masing-masing aparatur untuk meningkatkan kinerjanya.

Kami menyadari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Nganjuk Tahun 2024 ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya saran maupun masukan, serta kritik yang sifatnya membangun sangat kami butuhkan demi penyempunaan laporan kami pada Tahun mendatang.

Nganjuk, Januari 2025
CAMAT NGANJUK

HARI MOEKTIONO, S.STP., M.AP.
Pembina Tingkat I
NIP. 19780503 199711 1 001